Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

# RENCANA KERJA 2020

Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
GEDUNG MANGGALA WANABAKTI BLOK IV LT 4
JJL. GATOT SUBROTO, SENAYAN, JAKARTA PUSAT 10270

PERATURAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
No : P. 1/SET/PROEV/SET.1/12/2019

TENTANG

RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN
HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor. P.51/ MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Kerja Eselon I selaku penanggungjawab program dan Eselon II serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) selaku penanggungjawab kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja yang berpedoman pada Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.12/PHLHK/SET/REN.0 /12/2019 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020, diamanatkan Rencana Kerja di setiap tahun untuk Eselon I dan Eselon II dilingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang…

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 s/d 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204)
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata Mengenai Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6125)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 105, tambahan lembaran);
14. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174);
15 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
16. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No : PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 211);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Dan/Atau Perusakan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 621);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 642);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 749);

21. Peraturan Menteri…

21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.45/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2017 tentang Seragam Dan Perlengkapan Polisi Kehutanan Dan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1103);
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.51/MENLHK-SETJEN/ROKUM.1/8/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.57/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2017 tentang Dukungan Data, Informasi Dan Ahli Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1639);
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.83/MENLHK-SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Tata Hubungan Kerja Pelaksanaan Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1060);
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.43/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2018 tentang Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 959);
26. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Republik Indonesia No.5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 563);
27. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Republik Indonesia No 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1345);
30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024
31 Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 s/d 2024
32 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No : P.82/ 2019 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020;
33 Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.12/PHLHK/SET/REN.0/12/2019 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020.

Pasal 1

Peraturan Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini bertujuan memberikan pedoman dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan anggaran lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2020.

Pasal 2

Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretariat Direktorat Jenderal Ini.

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal 5 Desember 2019

Plt.Sekretaris Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

JASMIN RAGIL UTOMO, SH, MM
NIP.19640603 199203 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
NOMOR : P.1/SET/PROEV/SET.1/12/2019
TANGGAL : 5 Desember 2019

# TENTANG
# RENCANA KERJA
# SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
# TAHUN 2020

# KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 disusun dengan berpedoman Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: P.12/PHLHK/SET/REN.0/12/2019 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020.

Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 ini diharapkan dapat digunakan dalam menyusun RKA-K/L tahun 2020, pelaksanaan, dan pengendalian program pembangunan lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara sinergis dan berkesinambungan.

Akhir kata, semoga Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh segenap aparat lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Jakarta, 5 Desember 2019

Plt.Sekretaris Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

JASMIN RAGIL UTOMO, SH, MM
NIP.19640603 199203 1 001

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... I
DAFTAR ISI ..... II
DAFTAR GAMBAR ..... III
DAFTAR TABEL ..... III

**BAB I PENDAHULUAN ..... 4**

**A. LATAR BELAKANG ..... 4**
**B. TUGAS DAN FUNGSI ..... 5**
**C. KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DAN KOMPONEN ..... 6**
*1. Bagian Program dan Evaluasi ..... 7*
*2. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana ..... 8*
*3. Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik ..... 9*
*4. Bagian Keuangan dan Umum ..... 10*
**D. DATA TERPILAH SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PHLHK; ..... 11**
**E. INDENTIFIKASI TAGGING GENDER RKA K/L DITJEN GAKKUM KLHK TA 2020; ..... 12**

**BAB II CAPAIAN DAN PROGNOSIS KINERJA ..... 13**

**A.CAPAIAN INDIKATOR KINERJA ..... 13**
*1.Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2015 s.d 2018; ..... 13*
*2.Capaian Serapan Anggaran Tahun 2015 s.d 2018; ..... 13*
**B. PROGNOSIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN ..... 13**
*1.Prognosis Indikator Kinerja Kegiatan TA 2019; ..... 13*
*2.Prognosis Anggaran TA 2019; ..... 13*
**C.MATRIKS TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PHLHK TA 2015 S.D 2018;CAPAIAN UNIT KEGIATAN TA 2015 S. ..... 14**
**D. MATRIKS TARGET DAN PROGNOSIS UNIT KEGIATAN TA 2019; ..... 15**

**BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2020 ..... 16**

**A. RENCANA KERJA KEGIATAN TA 2020 ..... 16**

**B. RINCIAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA K/L) PER BAGIAN TA 2020; ..... 17**

**C. USULAN INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN TA 2020; ..... 17**

**D. RINCIAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA K/L) TA 2020; ..... 18**

**BAB IV PENUTUP ..... 21**

**BAB V LAMPIRAN LAMPIRAN ..... 22**

**LAMPIRAN I - LOGIC MODEL SEKRETARIAT DITJEN PHLHK TA 2020 ..... 23**
**LAMPIRAN II - MATRIKS RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN (RKA K/L) PER KOMPONEN, PER SUB KOMPONEN TA 2020 ..... 24**

# DAFTAR GAMBAR


| | | | No |
|---|---|---|---|
| Gambar | 01 | Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHLHK | 6 |


# DAFTAR TABEL


| | | | No |
|---|---|---|---|
| Tabel | 1 | Data Terpilah Sumber Daya Manusia Ditjen GAKKUM KLHK | 11 |
| Tabel | 2 | Anggaran Responsif Gender (ARG) Ditjen GAKKUM KLHK TA 2020 | 12 |
| Tabel | 3 | Matriks Target dan Capaian TA 2015 s.d 2018 | 13 |
| Tabel | 4 | Capaian Serapan Anggaran TA 2015 s/d 2018 | 13 |
| Tabel | 5 | Prognosis Indikator Kinerja Kegiatan TA 2019 | 13 |
| Tabel | 6 | Prognosis Serapan Anggaran TA 2019 | 13 |
| Tabel | 7 | Matriks Target dan Capaian Unit Kegiatan TA 2015 s/d 2018 | 14 |
| Tabel | 8 | Matriks Target dan Prognosis Unit Kegiatan TA 2019 | 15 |
| Tabel | 9 | Matriks Rencana Kerja Kegiatan Dukungan Manajemen TA 2020 | 16 |
| Tabel | 10 | Matriks Rincian RKA K/L Per Bagian lingkup Setditjen PHLHK TA 2020 | 17 |
| Tabel | 11 | Matriks Usulan Indikator Kinerja Unit Kegiatan lingkup Setditjen PHLHK TA 2020 | 17 |
| Tabel | 12 | Rincian RKA K/L Setditjen PHLHK TA 2020 | 18 |

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 2 didalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.82/MENLHK/SETJEN/ SET.1/11/2019 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2020 dan Pasal 3 di dalam Peraturan Menteri LHK RI Nomor P.51/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/11/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja KLHK, disebutkan bahwa Rencana Kerja (Renja) KLHK menjadi acuan dalam penyusunan Renja Unit Kerja Eselon I dan Eselon II lingkup KLHK.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 di dalam Peraturan Direktur Jenderal PHLHK Nomor: P.12/PHLHK/SET/REN.0/12/2019 tentang Renja Direktorat Jenderal PHLHK Tahun 2020, menjadi acuan penyusunan Renja Unit Kerja Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) dan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Direktorat Jenderal PHLHK.

Acuan penyusunan Renja diatas selanjutnya dituangkan didalam Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK TA 2020 yang menjadi kesepakatan baik dalam sasaran unit kegiatan, pendanaan maupun ukuran keberhasilannya sesuai dengan arahan Rencana Strategis 2015 s.d 2019, dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 yang dituangkan di dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian atau Lembaga (RKA K/L) TA 2020, Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK.

B. Tugas Dan Fungsi

Pada pasal 1109 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015, didalam melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan kerjasama teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
2. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan pengelolaan sistem informasi di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
3. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
4. koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang- undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pertimbangan dan bantuan hukum di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
5. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan jejaring kerja, pembinaan sumber daya penegak hukum, pelayanan profesi sumber daya penegak hukum, serta sarana dan prasarana operasional penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; dan
6. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal;

C. Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Komponen

Dengan demikian Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimaksudkan untuk menyusun langkah-langkah Kerja dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dimana sesuai arahan Indikator Kinerja Utama Program Sekretaris Jenderal Tahun Anggaran 2020, poin 1 dari 5 Poin, dimana untuk Nilai Reformasi Birokrasi, target reformasi birokrasi pada tahun 2020 ialah sebesar 75 Poin.

Penilaian merujuk pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Permen 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

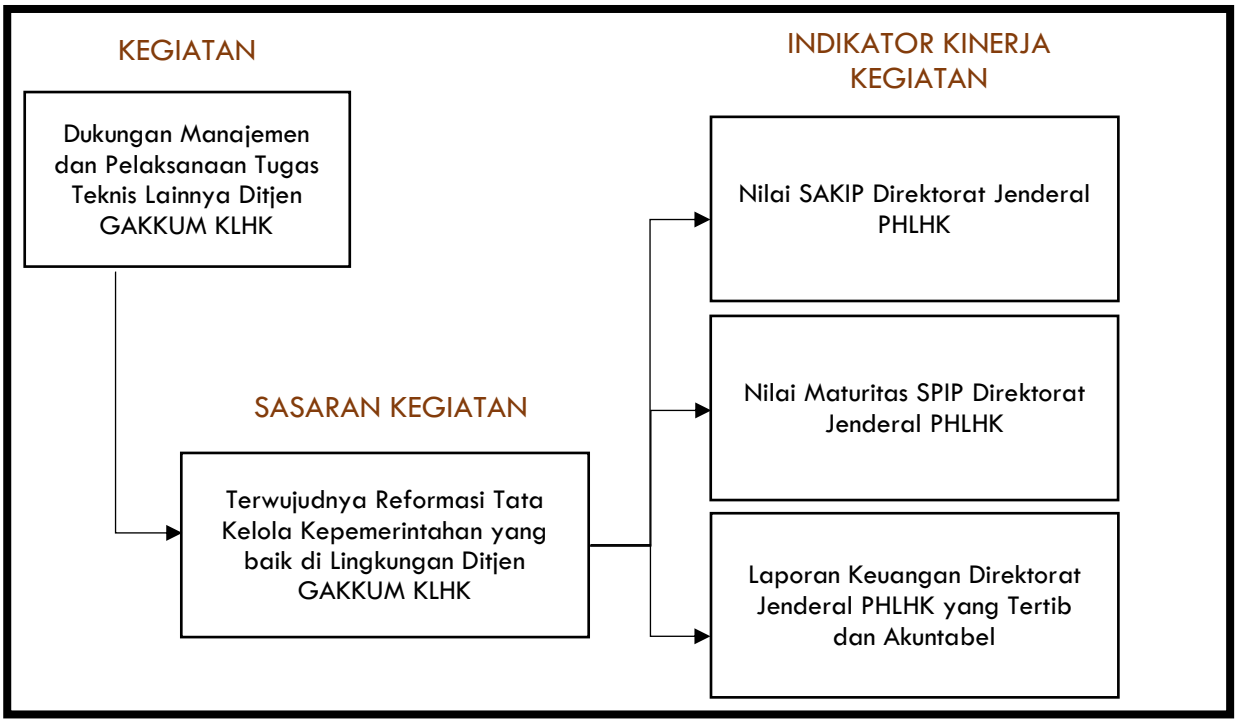


*Gambar 1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2020 s.d 2024*

Sasaran dari Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan ialah bahwa reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus terwujud.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan membawahi 4 (Empat) Unit Bagian :

1. Bagian Program dan Evaluasi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran, data, evaluasi, dan pelaporan serta pengelolaan manajemen informasi dan kehumasan.

   Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

   a) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
   b) penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program; dan
   c) penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi dan kehumasan;

   Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas:

   a) Subbagian Program dan Anggaran, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran.
   b) Subbagian Evaluasi, Pelaporan, Data dan Informasi, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program, pengumpulan dan pengolahan bahan pengelolaan sistem informasi dan kehumasan;

2. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, pelaksanaan pembinaan sumber daya penegak hukum, dan pelayanan profesi sumber daya penegak hukum, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:
   a) pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
   b) pelaksanaan pembinaan sumber daya penegak hukum, dan pelayanan profesi sumber daya penegak hukum;
   c) pelaksanaan urusan pengembangan karier pegawai dan administrasi jabatan fungsional; dan
   d) penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan;

   Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:
   a) Subbagian Kepegawaian, yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana formasi pegawai, administrasi kepegawaian dan pendisiplinan dan penghargaan pegawai, dan melakukan penyiapan bahan pengembangan pendidikan, pelatihan, pendisiplinan dan penghargaan pegawai serta administrasi jabatan fungsional.
   b) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana, yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan analisis jabatan, perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan evaluasi kinerja organisasi, serta penyusunan tata hubungan kerja, pedoman dan prosedur kerja dan pembakuan prasarana dan sarana kerja.

3. Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan permasalahan, pertimbangan, advokasi hukum, fasilitasi kerja sama dan jejaring kerja, serta penyiapan bahan administrasi kerja sama teknis dalam negeri dan luar negeri.

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik menyelenggarakan fungsi:

a) penyiapan bahan peraturan perundang-undangan;
b) fasilitasi kerja sama dan jejaring kerja;
c) penyiapan bahan pertimbangan dan advokasi hukum; dan
d) penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknis terdiri atas:

a) Subbagian Hukum, yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, serta melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, dan penanganan permasalahan, pertimbangan dan advokasi permasalahan hukum.
b) Subbagian Kerja Sama Teknik, yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan dan koordinasi administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri, serta fasilitasi kerjasama dan jejaring kerja.

4. Bagian Keuangan dan Umum

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan, dan pengelolaan urusan keuangan, serta penyiapan sarana dan prasarana operasional penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

a) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, kearsipan, dan pengelolaan barang milik negara;
b) penyiapan sarana dan prasarana operasional penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
c) pelaksanaan urusan administrasi keuangan; dan
d) pelaksanaan urusan perlengkapan;

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

a) Subbagian Tata Usaha, yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan pembinaan tata persuratan serta urusan rumah tangga.
b) Subbagian Perlengkapan, yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan barang milik negara.
c) Subbagian Administrasi Keuangan, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata laksana keuangan, penyusunan rencana anggaran gaji dan penggajian, penyiapan bahan perbendaharaan melakukan akuntansi keuangan barang milik Negara, pembinaan kebendaharaan petugas SAI dan petugas SIMAK-BMN, verifikasi, pelaporan keuangan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

D. Data Terpilah Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK;

Data SDM di Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan per 20 Januari 2020 berjumlah 71 orang yang terdiri dari 46 orang PNS dan 25 orang Non PNS, dengan komposisi pemilahan data berdasarkan Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Usia serta Status Fungsional ASN, seperti tabel di bawah ini:

| No | Sumber Daya Manusia | Jenis Kelamin | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | L | P | |
| 1 | ASN PNS | 29 | 17 | 46 |
| 2 | PPNPN | 19 | 6 | 25 |
| TOTAL | | | | 71 |

| No | Sumber Daya Manusia | Tingkat Pendidikan | | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SMP | SMU | D3 | S1 | S2 | S3 | |
| 1 | ASN PNS | 0 | 12 | 7 | 14 | 11 | 2 | 46 |
| 2 | PPNPN | 0 | 10 | 2 | 12 | 1 | 0 | 25 |
| TOTAL | | | | | | | | 71 |

| **No** | **Unit Kerja** | **Usia (th)** | | | | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **21 - 30** | **31 - 40** | **41 - 50** | **< 50** | |
| 1 | ASN PNS | 2 | 14 | 12 | 18 | 46 |
| 2 | PPNPN | 14 | 16 | 1 | 4 | 25 |
| TOTAL | | | | | | 71 |

| **STATUS FUNGSIONAL** | **JENJANG** | **PEGAWAI SETDITJEN PHLHK** |
|---|---|---|
| STRUKTURAL | | 15 |
| PELAKSANA | | 25 |
| FUNGSIONAL LAIN | Terampil | 3 |
| | Ahli | 3 |
| **TOTAL PEGAWAI** | | **46** |

| **STATUS FUNGSIONAL** | **JENJANG** | **SETDITJEN PHLHK** |
|---|---|---|
| Fungsional Perencana | Terampil | 3 |
| | Ahli | 0 |
| Fungsional Analis Kebijakan | Terampil | 0 |
| | Ahli | 3 |
| TOTAL FUNGSIONAL LAIN | | |
| **TOTAL FUNGSIONAL** | | 6 |

*Tabel 1 Data Terpilah Sumber Daya Manusia Ditjen GAKKUM KLHK*

E. Indentifikasi Tagging Gender RKA K/L Ditjen GAKKUM KLHK TA 2020;

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) lingkup KLHK sesuai dengan Peraturan Menteri LHK RI Nomor P.31/MENLHK/SETJEN/ SET.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG bidang LHK. Oleh karena itu didalam Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), proses Indentifikasi Gender di mulai dari Penganggaran yang di sepakati Unit Eselon I dengan Kementerian Keuangan melalui Website KRISNA yaitu berupa Tagging Gender di RKA K/L TA 2020, dalam hal ini di lingkup Perencaanaan Program GAKKUM KLHK, seperti tabel dibawah ini :

| KODE | PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, KOMPONEN | TARGET | SATUAN | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|
| 029.10 | Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan | | | |
| 5428 | Kegiatan : Pencegahan dan Pengamanan Hutan | | | |
| 5428.001 | Output : Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan | 3.000.000 | Hektar | |
| 002 | Komponen : Penguatan Fungsi Pencegahan dan Pengamanan Hutan | 15 | Kegiatan | |
| 053 | Peningkatan Kapasitas Polhut | 660 | Orang | 5.298.139.000 |
| 5430 | Kegiatan : Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi | | | |
| 5428.001 | Output : PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya | 200 | Orang | 4.000.000.000 |
| 5431 | Kegiatan : Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan | | | |
| 5428.002 | Output : PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya | 210 | Orang | |
| 052 | Peningkatan Kapasitas PPNS bidang LHK | 210 | Orang | 3.900.000.000 |
| 5427 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan | | | |
| 001 | Layanan Dukungan Manajemen Kantor Pusat | | | |
| 051 | Penyusunan rencana program; dan Penyusunan rencana anggaran | | | |
| | Pelaksanaan Kelembagaan PUG (Sub POKJA Gender TA 2020) Ditjen GAKKUM KLHK | 6 | Bulan | 169.310.000 |
| 951 | Layanan Sarana Prasarana Internal yang Responsive Gender | 1 | Layanan | 2.250.000.000 |
| Anggaran Pelaksanaan PUG Ditjen GAKKUM KLHK TA 2020 | | | | 15.448.139.000 |
| Anggaran Kelembagaan PUG (Sub POKJA Gender TA 2020) Ditjen GAKKUM KLHK | | | | 169.310.000 |
| Total Anggaran Responsive Gender (ARG) Ditjen GAKKUM KLHK | | | | 15.617.449.000 |

*Tabel 2 Anggaran Responsif Gender (ARG) Ditjen GAKKUM KLHK TA 2020*

# BAB II CAPAIAN DAN PROGNOSIS KINERJA

A.Capaian Indikator Kinerja

1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tahun 2015 s.d 2018;

| KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Satuan |
| Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen GAKKUM KLHK | Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen GAKKUM KLHK | SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 70 | 72 | 75 | 78 | Poin |
| | | | CAPAIAN | | | | |
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Satuan |
| | | | 75,98 | 70,43 | 72,58 | 76,64 | Poin |

*Tabel 3 Matriks Target dan Capaian Kegiatan TA 2015 s.d 2018*

2. Capaian Serapan Anggaran Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tahun 2015 s.d 2018;

| KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | ANGGARAN (000) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen GAKKUM KLHK | Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen GAKKUM KLHK | SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 85.358.870 | 74.714 .315. | 45.706.827 | 44,859,148 |
| | | | REALISASI ANGGARAN (000) | | | |
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | 67.589.154 | 74.069 .555 | 43.789.770 | 43,888,843 |

*Tabel 4 Matriks Anggaran dan Realisasi Kegiatan 2015 s.d 2018*

B. Prognosis Indikator Kinerja Kegiatan

1. Prognosis Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 2019;

| KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | Satuan |
| Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen GAKKUM KLHK | Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen GAKKUM KLHK | SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 78 | Poin |
| | | | PROGNOSIS CAPAIAN | |
| | | | 2019 | Satuan |
| | | | 76 | Poin |

*TABEL 5 Matriks Prognosis Indikator Kinerja Kegiatan TA 2019*

2. Prognosis Anggaran Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 2019;

| KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | ANGGARAN 2019 |
|---|---|---|---|
| Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen GAKKUM KLHK | Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen GAKKUM KLHK | SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 50,579,285,000 |
| | | | PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 2019 |
| | | | 50,073,073,492 (99%) |

*TABEL 6 Matriks Prognosis Serapan Anggaran TA 2019*

C.Matriks Target dan Capaian Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK TA 2015 s.d 2018;

| SASARAN UNIT KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN | TARGET RENCANA STRATEGIS 2015 s.d 2018 | | | | CAPAIAN RENCANA STRATEGIS 2015 s.d 2018 | | | | SATUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Terselenggara nya kegiatan perencanaan dan evaluasi LHK | Jumlah capaian sasaran indikator program dan indikator kegiatan; | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Persen |
| | Nilai SAKIP Dirjen PHLHK; | 70 | 72 | 74 | 76 | 75,98 | 70,43 | 72,58 | 76,64 | Poin |
| | Jumlah satker yang terselenggara program dan kegiatan; | 52 | 78 | 10 | 10 | 52 | 83 | 10 | 10 | Satuan Kerja |
| Meningkatnya cakupan dan penetrasi komunikasi dan kampanye PHLHK | Jumlah berita media mengenai kegiatan PHLHK kepada masyarakat | 60 | 80 | 100 | 110 | 60 | 96 | 96 | 105 | Siaran Pers Melalui Media |
| | Jumlah media kampanye/ pameran PHLHK melalui media cetak elektronik, tradisional dan social | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 3 | 6 | Media Kampanye / Pameran |
| Tercapainya data dan informasi PHLHK | Jumlah satker yang memiliki sistem informasi berfungsi memenuhi standar minimal setiap tahun | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | Satker |
| | Jumlah publikasi PHLHK | 80 | 85 | 90 | 95 | 134 | 200 | 100 | 103 | Publikasi |
| Meningkatnya daya saing SDM Ditjen PHLHK | Tersedianya Polisi Kehutanan, PPNS,PPLH dalam mendukung PHLHK dan SDM PHLHK Kompeten; | 3175 | 3225 | 3275 | 3325 | 5 | 5 | 775 | 973 | Orang |
| | Jumlah PPLH memenuhi kebutuhan untuk pengawasan | 138 | 188 | 238 | 288 | 15 | 15 | 34 | 130 | PPLH |
| | Jumlah PPNS memenuhi kebutuhan untuk penyidikan dalam rangka penegakan hukum | 154 | 204 | 254 | 304 | 18 | 18 | 174 | 215 | PPNS |
| | Jumlah SDM PHLHK yang meningkat kompetensinya | 208 | 238 | 268 | 298 | 277 | 291 | 291 | 280 | Orang |
| Tersusunnya struktur organisasi tata kerja yang proporsional, efektif dan efesien | Jumlah UPT Penegakan Hukum yang efektif dan efesien | 51 | 77 | 5 | 5 | 51 | 5 | 5 | 5 | UPT |
| Tersedianya Rancangan Aturan dan NSPK terkait Ditjen PHLHK | Jumlah Rancangan Kebijakan Strategis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | Dokumen |
| | Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | Dokumen |
| Tersedianya bantuan hukum Ditjen PHLHK | Jumlah Bantuan Hukum Ditjen PHLHK | 5 | 5 | 7 | 8 | 1 | 5 | 9 | 12 | Bantuan Hukum |
| Terselenggaranya Kerjasama Teknis dalam Meningkatkan Efektifitas Kegiatan PHLHK | Jumlah Kerjasama Teknik dalam negeri terkelola | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | Kerjasama DN |
| | Jumlah Kerjasama Teknik Luar Negeri terkelola | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | Kerjasama LN |
| Meningkatnya Administrasi Keuangan Ditjen PHLHK secara Efektif | Opini WTP untuk Laporan Keuangan | WTP | WTP | WTP | WTP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP |
| Terselenggaranya Pengelolaan Ketatausahaan, kerumahtanggan dan pengelolaan perlengkapan | Jumlah Manajemen asset | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Manajeme n Asset |
| | Jumlah Sarana dan Peralatan LHK terdistribusi di Satuan Kerja dan berfungsi baik sesuai dengan NSPK | 135 | 729 | 1948 | 198 | 135 | 729 | 1948 | 198 | Unit |

TABEL 7 Matriks Target dan Capaia Unit Kegiatan TA 2015 s.d 2018

D. Matriks Target Dan Prognosis Unit Kegiatan TA 2019;

| UNIT KEGIATAN | SASARAN UNIT KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | PROGNOSIS TA 2019 | CAPAIAN | SATUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAM DAN EVALUASI | Terselenggara nya kegiatan perencanaan dan evaluasi LHK | Jumlah capaian sasaran indikator program dan indikator kegiatan; | 95 | 97 | 98 | Persentase |
| | | Nilai SAKIP Dirjen PHLHK; | 78* | 77 | * | Poin |
| | | Jumlah satker yang terselenggara program dan kegiatan; | 10 | 10 | 10 | Satuan Kerja |
| | Meningkatnya cakupan dan penetrasi komunikasi dan kampanye PHLHK | Jumlah berita media mengenai kegiatan PHLHK kepada masyarakat | 120 | 121 | 102 | Siaran Pers Melalui Media |
| | | Jumlah media kampanye/pameran PHLHK melalui media cetak elektronik, tradisional dan social | 12 | 12 | 9 | Media Kampanye/ Pameran |
| | Tercapainya data dan informasi PHLHK | Jumlah satker yang memiliki sistem informasi berfungsi memenuhi standar minimal setiap tahun | 10 | 10 | 10 | Aplikasi |
| | | Jumlah publikasi PHLHK | 100 | 105 | 129 | Publikasi |
| | | Tersedianya Bahan Kerja Pimpinan | 12 | 12 | 12 | Bahan Kerja |
| KE PEGAWAIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | Meningkatnya daya saing SDM Ditjen PHLHK | Tersedianya Polisi Kehutanan, PPNS,PPLH dalam mendukung PHLHK dan SDM PHLHK Kompeten; | 3375 | 3380 | 2.470 | Orang |
| | | Jumlah PPLH memenuhi kebutuhan untuk pengawasan | 338 | 340 | 146 | PPLH |
| | | Jumlah PPNS memenuhi kebutuhan untuk penyidikan dalam rangka penegakan hukum | 354 | 354 | 210 | PPNS |
| | | Jumlah SDM PHLHK yang meningkat kompetensinya | 328 | 330 | 1.506 | Orang |
| | Tersusunnya struktur organisasi tata kerja yang proporsional, efektif dan efesien | Jumlah UPT Penegakan Hukum yang efektif dan efesien | 5 | 5 | 5 | UPT |
| HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIS | Tersedianya Rancangan Aturan dan NSPK terkait Ditjen PHLHK | Jumlah Rancangan Kebijakan Strategis | 2 | 2 | 4 | Dokumen |
| | | Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) | 5 | 5 | 1 | Dokumen |
| | Tersedianya bantuan hukum Ditjen PHLHK | Jumlah Bantuan Hukum Ditjen PHLHK | 10 | 10 | 15 | Bantuan Hukum |
| | Terselenggaranya Kerjasama Teknis dalam Meningkatkan Efektifitas Kegiatan PHLHK | Jumlah Kerjasama Teknik dalam negeri terkelola | 4 | 4 | 10 | Kerjasama DN |
| | | Jumlah Kerjasama Teknik Luar Negeri terkelola | 5 | 5 | 5 | Kerjasama LN |
| KEUANGAN DAN UMUM | Meningkatnya Administrasi Keuangan Ditjen PHLHK secara Efektif | Opini WTP untuk Laporan Keuangan | WTP | WTP | WDP | WTP |
| | Terselenggaranya Pengelolaan Ketatausahaan, kerumahtanggan dan pengelolaan perlengkapan | Jumlah Manajemen Asset | 1 | 1 | 1 | Mgt Asset |
| | | Jumlah Sarana dan Peralatan LHK terdistribusi di Satuan Kerja dan berfungsi baik sesuai dengan NSPK | 241 | 241 | 241 | Unit |

*TABEL 8* Matriks Target dan Prognosis Unit Kegiatan lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK TA 2019;

** Capaian SAKIP TA 2019 akan di nilai di tahun 2020;*

# BAB III
# RENCANA KERJA TAHUN 2020

A. Rencana Kerja Kegiatan TA 2020

| KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | SATUAN | ANGGARAN ('000) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen GAKKUM KLHK | Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen GAKKUM KLHK | SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 75 | Poin | 173.019.771.000 |
| | | Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 3 | Level | |
| | | Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tertib dan akuntabel | 1 | Dokumen | |

| KODE | KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT | TARGET | SATUAN | ANGGARAN ('000) |
|---|---|---|---|---|
| **5427** | **Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen GAKKUM KLHK** | **75 Poin** | **173.019.771.000** | |
| 5427.950 | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | 1 Layanan | 26.012.009.000 | |
| 01.950.001 | Layanan Dukungan Manajemen Kantor Pusat | | | 19.452.009.000 |
| 01.950.002 | Layanan Dukungan Manajemen Satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) | | | 6.560.000.000 |
| 01.951 | Layanan Sarana Prasarana Internal | 1 Layanan | 2.250.000.000 | |
| 01.951.001 | Layanan Sarana dan Prasarana Internal Kantor Pusat | | | 2.250.000.000 |
| 01.951.002 | Layanan Sarana dan Prasarana Unit Pelaksana Teknis (UPT) | | | 0 |
| 01.994 | Layanan Perkantoran | 1 Layanan | 144.757.762.000 | |
| 01.994.001 | Layanan Perkantoran Setditjen PHLHK | | | 30.848.347.000 |
| 01.994.002 | Layanan Perkantoran Direktorat PPSA | | | 1.903.400.000 |
| 01.994.003 | Layanan Perkantoran Direktorat PSLH | | | 1.619.050.000 |
| 01.994.004 | Layanan Perkantoran Direktorat PPH | | | 2.030.480.000 |
| 01.004.005 | Layanan Perkantoran Direktorat PHP | | | 1.769.779.000 |
| 01.994.006 | Layanan Perkantoran Unit Pelaksana Teknis (UPT) | | | 106.586.706.000 |
| | Provinsi Sumatera Utara | | | 27.128.401.000 |
| | Provinsi Jawa Timur | | | 24.477.900.000 |
| | Provinsi Kalimantan Timur | | | 20.917.291.000 |
| | Provinsi Sulawesi Selatan | | | 19.066.207.000 |
| | Provinsi Papua Barat | | | 14.996.907.000 |
| | | | Total | 173.019.771.000 |

*Tabel 9 Matriks Rencana Kerja Kegiatan Dukungan Manajemen TA 2020*

**B. Rincian Rencana Kerja Anggaran (RKA K/L) Per Bagian, lingkup Setditjen PHLHK TA 2020;**

| KODE | URAIAN | ANGGARAN |
|---|---|---|
| **A** | **Bagian Program dan Evaluasi** | **7.457.009.000** |
| 051 | Penyusunan rencana program; dan Penyusunan rencana anggaran | 3.182.009.000 |
| 052 | Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi | 3.275.000.000 |
| **B** | **Bagian Hukum dan Kerjasama Tekins** | **3.350.000.000** |
| 056 | Pelayanan hukum dan kepatuhan internal | 3.350.000.000 |
| **C** | **Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana** | **4.670.000.000** |
| 057 | Pengelolaan kepegawaian | 3.420.000.000 |
| 061 | Pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi | 1.250.000.000 |
| **D** | **Bagian Keuangan dan Umum** | **4.970.000.000** |
| 054 | Pengelolaan keuangan | 2.150.000.000 |
| 058 | Pelayanan umum dan perlengkapan | 2.820.000.000 |

**C. Usulan Indikator Kinerja Unit Kegiatan lingkup Setditjen PHLHK LHK TA 2020;**

| SASARAN UNIT KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN | TARGET 2020 |
|---|---|---|
| A. BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI | | |
| Tersedianya Dokumen Rencana Program Ditjen. Gakkum LHK | Jumlah Dokumen RENJA Ditjen. Gakkum LHK | 1 Dokumen |
| | Jumlah Dokumen RENJA Unit Kerja Gakkum LHK | 10 Dokumen |
| | Jumlah Dokumen RAN Aksi Ditjen. Gakkum LHK | 10 Dokumen |
| | Jumlah Dokumen Renstra Ditjen. Gakkum LHK | 1 Dokumen |
| | Jumlah Dokumen Renstra Unit Kerja Gakkum LHK | 10 Dokumen |
| Tersedianya Dokumen Anggaran Ditjen. Gakkum LHK | Jumlah Dokumen RKAKL | 6 RKA K/L |
| | Jumlah Dokumen Revisi RKAKL | 12 Dokumen |
| | Peraturan Standar Kegiatan dan Biaya | 1 Dokumen |
| | Peraturan Standar Biaya Teknis | 1 Dokumen |
| Terselenggaranya Dukungan Program dan Anggaran Penegakan Hukum LHK | Jumlah bahan kerja pimpinan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 12 Laporan |
| | Raker Penegakan Hukum | 2 Laporan |
| Tersedianya Dokumen Pelaporan Lingkup Ditjen. Gakkum LHK | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Lingkup Ditjen. Gakkum LHK | 11 Dokumen |
| | Jumlah Dokumen Desain SPIP Lingkup Ditjen. Gakkum LHK | 10 Desain SPIP |
| | Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Lingkup Ditjen. Gakkum LHK | 11 Dokumen |
| Meningkatnya Cakupan dan Penetrasi Komunikasi dan Kampanye | Jumlah berita media massa mengenai kegiatan Penegakan Hukum LHK kepada Masyarakat | 100 Berita |
| | Jumlah media kampanye/pameran PHLHK | 10 Pameran |
| Tercapainya Data dan Informasi Penegakan Hukum LHK | Jumlah Satuan Kerja yang terkoneksi dengan system Data dan Informasi terpusat | 3 Satuan Kerja |
| | Jumlah Publikasi melalui Media Sosial Penegakan Hukum (FB, IG, Twiter, Youtube dan Website) | 500 Postingan |

| SASARAN UNIT KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN | TARGET 2020 |
|---|---|---|
| B. BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | | |
| Meningkatnya daya saing SDM Ditjen PHLHK | Tersedianya Polisi Kehutanan dalam Mendukung PHLHK; | 679 Polisi Kehutanan |
| | Tersedianya PPLH untuk memenuhi kebutuhan Pengawasan LH | 158 PPLH |
| | Tersedianya PPNS untuk memenuhi kebutuhan Penyidikan | 206 PPNS |
| | Jumlah SDM PHLHK yang meningkat kompetensinya | 1.326 Orang |
| Tersusunnya struktur organisasi tata dan kerja yang proporsional, efektif dan efesien | Terlaksananya Penyempurnaan Ketatatalaksanaan lingkup Ditjen PHLHK; | 1 Usulan |
| | Jumlah UPT Penegakan Hukum yang efektif dan efisien | 5 Satuan Kerja |
| C. BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIK | | |
| Tersedianya Rancangan Aturan dan NSPK | Jumlah Rancangan Regulasi terkait Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; | 3 Dokumen (Draft) |
| | Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) | 3 Dokumem (Perdirjen) |
| Tersedianya Rumusan Kajian Hukum | Jumlah Rumusan Kajian Hukum | 5 Laporan |
| Tersedianya bantuan hukum | Jumlah Bantuan Hukum Ditjen PHLHK | 5 Laporan (Dataset) |
| Terselenggaranya Kerjasama Teknis dalam Meningkatkan Efektifitas Kegiatan PHLHK | Jumlah Kerjasama Teknik dalam negeri terkelola | 12 Laporan Mitra Kerjasama |
| | Jumlah Kerjasama Teknik Luar Negeri terkelola | 5 Laporan Mitra Kerjasama |
| D. BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM | | |
| Meningkatnya Administrasi Keuangan Ditjen PHLHK secara Efektif | Opini WTP untuk Laporan Keuangan | 1 Dokumen |
| | Pengelola Anggaran Terakreditasi sesuai dengan PUU | 10 Orang |
| | Pengelolaan Administrasi Keuangan yang tertib sesuai dengan PUU (zero temuan) | 1 Dokumen |
| Terselenggaranya Pengelolaan Ketatausahaan, kerumahtanggan dan pengelolaan perlengkapan | Laporan BMN yang Akuntabel | 1 Dokumen |
| | Identifikasi register aset secara elektronik | 1 Dokumen |
| | Tersusunnya Rencana pengadaan BMN yang sesuai dengan kebutuhan dan tepat guna | 34 Unit |
| | Jumlah Sarana dan Peralatan LHK terdistribusi di Satuan Kerja dan berfungsi baik sesuai dengan NSPK | 1.556 Uit |
| | Penetapan Standar Sarana dan Prasarana | 1 Dokumen SK |
| | Penataan Dokumentasi berdasarkan Aplikasi SIK | 1 Dokumen |
| | Terlaksananya Pengelolaan Surat/Dokumen Dinas | 1 Laporan |
| | Tersedianya Layanan Rumah Tangga Pimpinan | 1 Laporan |

**D. Rincian Rencana Kerja Anggaran (RKA K/L) Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK TA 2020;**

| KODE | URAIAN | ANGGARAN |
|---|---|---|
| **051** | **Penyusunan rencana program; dan Penyusunan rencana anggaran** | **3.182.009.000** |
| A | Penyusunan Rencana Kerja Ditjen/Setditjen PHLHK Tahun 2021 | 208.780.000 |
| B | Kelompok Kerja Sinkronisasi Perencanaan Anggaran Ditjen PHLHK | 170.040.000 |
| C | Penyusunan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dan Standar Kegiatan dan Biaya Bidang PHLHK Tahun 2021 | 224.462.000 |
| D | Penyusunan Revisi Anggaran dan APBNP Tahun 2020 | 85.730.000 |
| E | Rapat Kerja Bersama Instansi/Pihak Terkait | 443.830.000 |
| F | Penyusunan Anggaran Tahun 2021 | 376.120.000 |
| G | Rapat Koordinasi Bidang PHLHK tahun 2020 | 135.290.000 |
| H | Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Ditjen PHLHK | 169.310.000 |
| J | Koordinasi/Supervisi/Pembinaan Bidang Program dan Anggaran | 146.000.000 |
| K | Penyusunan Rencana Strategis Ditjen Penegakan Hukum LHK Tahun 2020-2024 | 114.100.000 |
| L | Bimbingan Teknis dan Penyegaran Operator RKA-K/L Ditjen PHLHK Tahun 2020 | 217.877.000 |
| M | Penyusunan RPJMN Ditjen Penegakan Hukum LHK Tahun 2020-2024 | 310.321.000 |
| N | Rapat Koordinasi Anggaran Dekonsentrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 | 215.150.000 |
| O | Supervisi Pengelolaan Dana Dekonsentrasi | 211.580.000 |
| **052** | **Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi** | **3.275.000.000** |
| A | Kegiatan Monev dan Pengumpulan Data Pelaksanaan Gakkum 2020 | 298.905.000 |
| B | Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018 | 71.300.000 |
| C | Rakor Evaluasi Kinerja Penegakan Hukum LHK | 337.000.000 |
| D | Pelaksanaan SPIP Setditjen PHLHK | 151.205.000 |
| E | Penyusunan Laporan Tahunan Ditjen dan Setditjen Gakkum LHK Tahun 2018 | 25.370.000 |
| F | Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan Ditjen Gakkum LHK Tahun 2019 | 24.830.000 |
| G | Penyusunan Buku Statistik Ditjen PHLHK 2019 | 162.400.000 |
| H | Penyebarluasan Informasi Bidang PHLHK | 347.440.000 |
| I | Penyusunan NSPK | 233.830.000 |
| J | Pengelolaan Website Gakkum LHK | 261.780.000 |
| K | Pengujian Data dan Analisis Lapangan | 349.770.000 |
| L | Sinkronisasi dan Koordinasi Data dan Informasi Ditjen Gakkum | 457.630.000 |
| M | Pengayaan dan Akuisisi Data Gakkum LHK | 55.250.000 |
| N | Pelaporan / Telaahan Tematik | 51.450.000 |
| O | Publikasi/Pameran Gakkum | 446.840.000 |

| KODE | URAIAN | ANGGARAN |
|---|---|---|
| **056** | **Pelayanan hukum dan kepatuhan internal** | **3.350.000.000** |
| A | Penyusunan Rancangan Perundang-Undangan Bidang PHLHK | 278.960.000 |
| B | Rumusan Kajian Hukum | 693.890.000 |
| C | Pendampingan dalam rangka Penyelesaian Kasus LHK | 577.150.000 |
| D | Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri | 437.800.000 |
| E | Penyelenggaraan Kerja Sama Luar Negeri | 1.210.650.000 |
| F | Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Teknik | 151.550.000 |
| **057** | **Pengelolaan kepegawaian** | **3.420.000.000** |
| A | Pelayanan Administrasi Kepegawaian | 494.939.000 |
| B | Pelayanan Administrasi Jabatan Fungsional | 710.350.000 |
| C | Peningkatan Kapasitas Pegawai Ditjen PHLHK | 1.177.150.000 |
| D | Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Pengawas LH dan Polisi Kehutanan | 442.925.000 |
| E | Rapat Koordinasi TIM Penilai AK UPT dan Daerah | 594.636.000 |
| **061** | **Pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi** | **1.250.000.000** |
| A | Penataan Organisasi dan Tata Laksana Ditjen Gakkum | 234.905.000 |
| B | Usulan Revisi Tunjangan Jabatan Fungsional Polhut dan Pengawas LH | 300.770.000 |
| C | Penyusunan Juklak Jabatan Fungsional Polhut dan Pengawas LH | 138.235.000 |
| D | Penyusunan ABK, Anjab dan Evajab | 134.650.000 |
| E | Penyusunan NSPK/SOP Ditjen PHLHK | 72.690.000 |
| F | Penyusunan SKP, E-Kinerja Ditjen PHLHK | 217.500.000 |
| G | Sosialisasi Peraturan Jabatan Fungsional Polhut dan Pengawas LH | 151.250.000 |
| 054 | Pengelolaan keuangan | 2.150.000.000 |
| A | Rekonsiliasi dan Konsolidasi laporan keuangan PHLHK | 244.575.000 |
| B | Penyusunan Laporan Keuangan PHLHK | 552.220.000 |
| C | Penyusunan Laporan Keuangan Likuidasi Entitas Keuangan Satker Pusat PHLHK | 230.000.000 |
| D | Koordinasi dan pembinaan keuangan bagian pelaksanaan anggaran | 598.599.000 |
| E | Penyegaran BP dan BPP Satker Lingkup Ditjen PHLHK | 120.150.000 |
| F | Tindak lanjut hasil audit | 179.000.000 |
| G | Peningkatan kapasitas dan pemahaman perpajakan BP, BPP, dan Pengelola Anggaran | 95.956.000 |
| H | Sertifikasi PPK dan PP-SPM | 129.500.000 |
| 058 | Pelayanan umum dan perlengkapan | 2.820.000.000 |
| A | Rekonsiliasi Penyusunan Laporan BMN Ditjen PHLHK | 217.312.000 |
| B | Penyusunan Laporan BMN Setditjen PHLHK | 181.648.000 |
| C | Penyusunan RKBMN Ditjen PHLHK | 149.180.000 |
| D | Koordinasi Pengelolaan BMN Ditjen PHLHK | 432.150.000 |
| E | Bimbingan Teknis Pengelolaan BMN | 476.940.000 |
| F | Rapat Koordinasi Pengelolaan BMN Ditjen PHLHK | 236.940.000 |
| G | Rekonsiliasi Penyusunan Laporan BMN Likuidasi Entitas | 125.830.000 |
| H | Pengelolaan Surat/Dokumen Dinas | 73.896.000 |
| I | Penataan arsip surat lingkup Setditjen PHLHK | 243.574.000 |
| J | Evaluasi Tata Naskah Dinas Lingkup Setditjen PHLHK | 423.580.000 |
| K | Administrasi layanan operasional pimpinan | 258.950.000 |

*Tabel 10 Matriks Rencana Kerja Unit Elemen Kegiatan Dukungan Manajemen TA 2020*

# BAB IV PENUTUP

Dalam menghadapi tantangan upaya penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yaitu menurunkan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Angggaran 2020 merupakan Dokumen tahun keenam yang menggambarkan tentang rencana kegiatan, anggaran dan capaian target yang akan dilaksanakan selama satu tahun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dengan demikian diharapkan Rencana Kerja Tahun 2020 yang telah disusun dapat memperlancar penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan hidup dan Kehutanan selama Tahun Anggaran 2020-2024.

# BAB V LAMPIRAN LAMPIRAN

## LAMPIRAN I - LOGIC MODEL SEKRETARIAT DITJEN PHLHK TA 2020

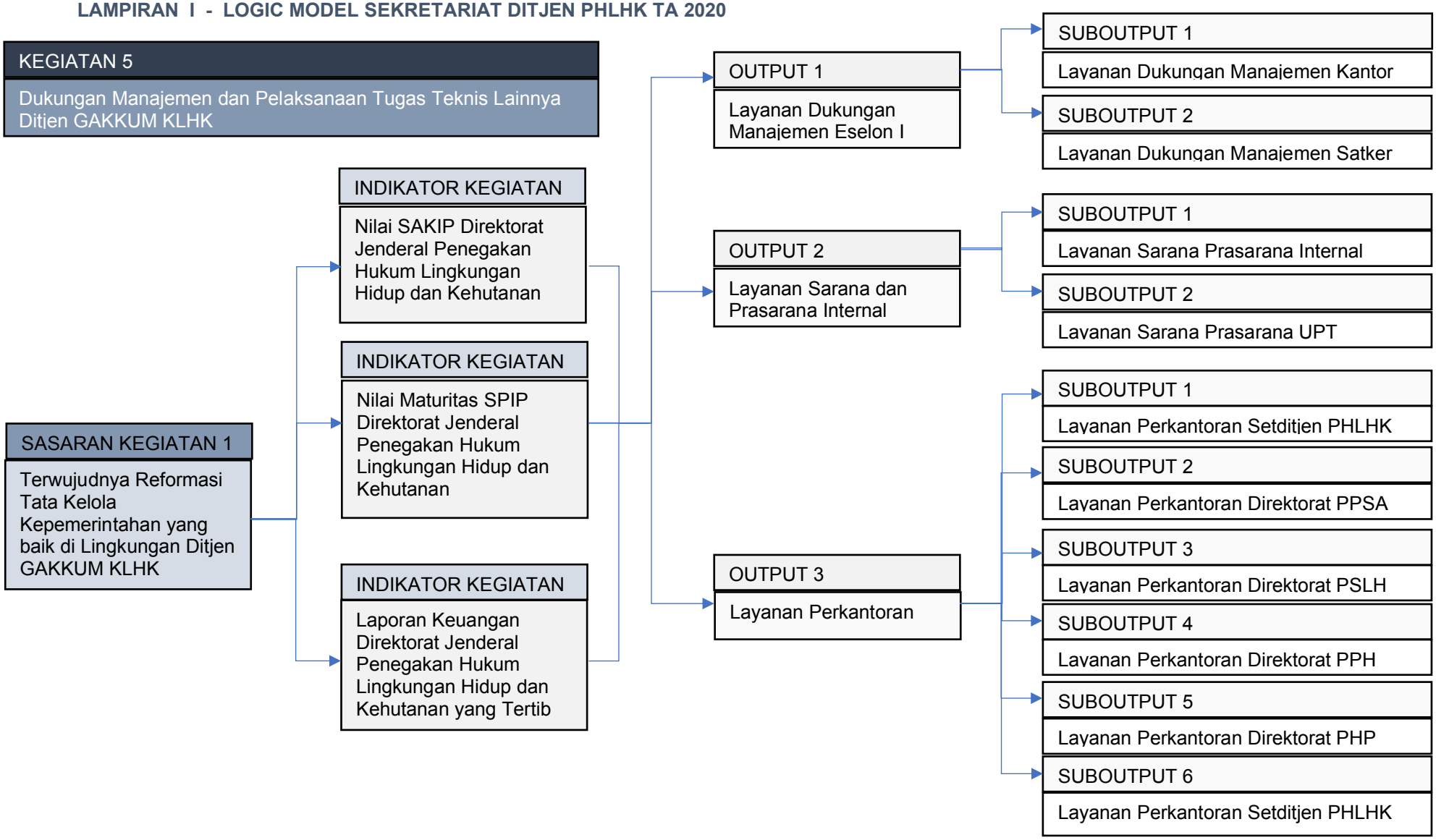

## LAMPIRAN II - MATRIKS RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN (RKA K/L) PER KOMPONEN, PER SUB KOMPONEN TA 2020

| KODE | URAIAN KOMPONEN KEGIATAN DAN, SUB KOMPONEN KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|---|---|
| 051 | Penyusunan rencana program; dan Penyusunan rencana anggaran | 3.182.009.000 |
| A | Penyusunan Rencana Kerja Ditjen/Setditjen PHLHK Tahun 2021 | 208.780.000 |
| B | Kelompok Kerja Sinkronisasi Perencanaan Anggaran Ditjen PHLHK | 170.040.000 |
| C | Penyusunan Juknis Penyusunan Anggaran dan SKB Bidang PHLHK Tahun 2021 | 224.462.000 |
| D | Penyusunan Revisi Anggaran dan APBNP Tahun 2020 | 85.730.000 |
| E | Rapat Kerja Bersama Instansi/Pihak Terkait | 443.830.000 |
| F | Penyusunan Anggaran Tahun 2021 | 376.120.000 |
| G | Rapat Koordinasi Bidang PHLHK tahun 2020 | 135.290.000 |
| H | Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Ditjen PHLHK | 169.310.000 |
| J | Koordinasi/Supervisi/Pembinaan Bidang Program dan Anggaran | 146.000.000 |
| K | Penyusunan Rencana Strategis Ditjen Penegakan Hukum LHK Tahun 2020-2024 | 114.100.000 |
| L | Bimbingan Teknis dan Penyegaran Operator RKA-K/L Ditjen PHLHK Tahun 2020 | 217.877.000 |
| M | Penyusunan RPJMN Ditjen Penegakan Hukum LHK Tahun 2020-2024 | 310.321.000 |
| N | Rapat Koordinasi Anggaran Dekonsentrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 | 215.150.000 |
| O | Supervisi Pengelolaan Dana Dekonsentrasi | 211.580.000 |

| KODE | URAIAN KOMPONEN KEGIATAN DAN, SUB KOMPONEN KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|---|---|
| 052 | Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi | 3.275.000.000 |
| A | Kegiatan Monev dan Pengumpulan Data Pelaksanaan Gakkum 2020 | 298.905.000 |
| B | Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018 | 71.300.000 |
| C | Rakor Evaluasi Kinerja Penegakan Hukum LHK | 337.000.000 |
| D | Pelaksanaan SPIP Setditjen PHLHK | 151.205.000 |
| E | Penyusunan Laporan Tahunan Ditjen dan Setditjen Gakkum LHK Tahun 2018 | 25.370.000 |
| F | Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan Ditjen Gakkum LHK Tahun 2019 | 24.830.000 |
| G | Penyusunan Buku Statistik Ditjen PHLHK 2019 | 162.400.000 |
| H | Penyebarluasan Informasi Bidang PHLHK | 347.440.000 |
| I | Penyusunan NSPK | 233.830.000 |
| J | Pengelolaan Website Gakkum LHK | 261.780.000 |
| K | Pengujian Data dan Analisis Lapangan | 349.770.000 |
| L | Sinkronisasi dan Koordinasi Data dan Informasi Ditjen Gakkum | 457.630.000 |
| M | Pengayaan dan Akuisisi Data Gakkum LHK | 55.250.000 |
| N | Pelaporan / Telaahan Tematik | 51.450.000 |
| O | Publikasi/Pameran Gakkum | 446.840.000 |

| KODE | URAIAN KOMPONEN KEGIATAN DAN, SUB KOMPONEN KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|---|---|
| 056 | Pelayanan hukum dan kepatuhan internal | 3.350.000.000 |
| A | Penyusunan Rancangan Perundang-Undangan Bidang PHLHK | 278.960.000 |
| B | Rumusan Kajian Hukum | 693.890.000 |
| C | Pendampingan dalam rangka Penyelesaian Kasus LHK | 577.150.000 |
| D | Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri | 437.800.000 |
| E | Penyelenggaraan Kerja Sama Luar Negeri | 1.210.650.000 |
| F | Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Teknik | 151.550.000 |

| KODE | URAIAN KOMPONEN KEGIATAN DAN, SUB KOMPONEN KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|---|---|
| 057 | Pengelolaan kepegawaian | 3.420.000.000 |
| A | Pelayanan Administrasi Kepegawaian | 494.939.000 |
| B | Pelayanan Administrasi Jabatan Fungsional | 710.350.000 |
| C | Peningkatan Kapasitas Pegawai Ditjen PHLHK | 1.177.150.000 |
| D | Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Pengawas LH dan Polisi Kehutanan | 442.925.000 |
| E | Rapat Koordinasi TIM Penilai AK UPT dan Daerah | 594.636.000 |
| 061 | Pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi | 1.250.000.000 |
| A | Penataan Organisasi dan Tata Laksana Ditjen Gakkum | 234.905.000 |
| B | Usulan Revisi Tunjangan Jabatan Fungsional Polhut dan Pengawas LH | 300.770.000 |
| C | Penyusunan Juklak Jabatan Fungsional Polhut dan Pengawas LH | 138.235.000 |
| D | Penyusunan ABK, Anjab dan Evajab | 134.650.000 |
| E | Penyusunan NSPK/SOP Ditjen PHLHK | 72.690.000 |
| F | Penyusunan SKP, E-Kinerja Ditjen PHLHK | 217.500.000 |
| G | Sosialisasi Peraturan Jabatan Fungsional Polhut dan Pengawas LH | 151.250.000 |

| KODE | URAIAN | ANGGARAN |
|---|---|---|
| 054 | Pengelolaan keuangan | 2.150.000.000 |
| A | Rekonsiliasi dan Konsolidasi laporan keuangan PHLHK | 244.575.000 |
| B | Penyusunan Laporan Keuangan PHLHK | 552.220.000 |
| C | Penyusunan Laporan Keuangan Likuidasi Entitas Keuangan Satker Pusat PHLHK | 230.000.000 |
| D | Koordinasi dan pembinaan keuangan bagian pelaksanaan anggaran | 598.599.000 |
| E | Penyegaran BP dan BPP Satker Lingkup Ditjen PHLHK | 120.150.000 |
| F | Tindak lanjut hasil audit | 179.000.000 |
| G | Peningkatan kapasitas dan pemahaman perpajakan BP, BPP, dan Pengelola Anggaran | 95.956.000 |
| H | Sertifikasi PPK dan PP-SPM | 129.500.000 |
| 058 | Pelayanan umum dan perlengkapan | 2.820.000.000 |
| A | Rekonsiliasi Penyusunan Laporan BMN Ditjen PHLHK | 217.312.000 |
| B | Penyusunan Laporan BMN Setditjen PHLHK | 181.648.000 |
| C | Penyusunan RKBMN Ditjen PHLHK | 149.180.000 |
| D | Koordinasi Pengelolaan BMN Ditjen PHLHK | 432.150.000 |
| E | Bimbingan Teknis Pengelolaan BMN | 476.940.000 |
| F | Rapat Koordinasi Pengelolaan BMN Ditjen PHLHK | 236.940.000 |
| G | Rekonsiliasi Penyusunan Laporan BMN Likuidasi Entitas | 125.830.000 |
| H | Pengelolaan Surat/Dokumen Dinas | 73.896.000 |
| I | Penataan arsip surat lingkup Setditjen PHLHK | 243.574.000 |
| J | Evaluasi Tata Naskah Dinas Lingkup Setditjen PHLHK | 423.580.000 |
| K | Administrasi layanan operasional pimpinan | 258.950.000 |

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
2020

GEDUNG MANGGALA WANABAKTI BLOK IV LT 4
JJL. GATOT SUBROTO, SENAYAN, JAKARTA PUSAT 10270